

Walikota

Cagar Budaya dan nilai-nilai Kota Yogya sebagai Kota Pendidikan," jelas Haryadi usai melakukan pertemuan dengan Sultan di Gedung Wili Kompleks Kepatihan, Kamis (3/9).

Walikota mengatakan, pemanfaatan Grha Padmanaba maupun gedung Stella Duce salah satu tujuannya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Karena di dalamnya akan ada beberapa fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Seperti ruang laboratorium, ruang kelas, IT, ruang pertemuan serta beberapa ruang lainnya yang rencananya akan dibangun 6 lantai. Adapun untuk pembiayaan Grha Padmanaba akan diambilkan dari dana Keluarga Besar Alumni (KBA) SMAN 3 Yogyakarta, sedangkan untuk Stella Duce dari Yayasan yang diprediksikan menghabiskan biaya sebesar Rp 15 miliar. Sebelum pembangunan dilakukan, selain memastikan kesiap-

an biaya juga perlu diperhatikan aktivitas pembelajaran tidak terganggu.

"Pemkot Yogyakarta memastikan pembangunan kedua gedung itu tidak mengganggu proses belajar mengajar. Begitu pula untuk pendanaannya harus dipastikan lancar dan tidak macet di tengah jalan. Adapun untuk waktu pembangunan, pihaknya belum bisa memastikan kapan akan mulai dan teknis di lapangan akan berjalan seperti apa," terangnya.

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono menambahkan gambaran awal desain pembangunan Grha Padmanaba di SMA N 3 Yogyakarta dan Gedung Stella Duce di SMA Stella Duce 1 merupakan kolonial indische. Kedua gedung yang berada di kawasan cagar budaya Kotabaru ini akan dimanfaatkan untuk men-

dukung dunia pendidikan sebagai tempat belajar mengajar seperti laboratorium, ruang pertemuan, fasilitas IT dan sebagainya.

Agus menegaskan lokasi rencana pembangunan gedung edukasi tersebut memang berada di Kawasan Kotabaru Kota Yogyakarta, namun untuk SMA N 3 Yogyakarta masuk tanggung jawab Pemda DIY. Karena masuk peraturan kawasan cagar budaya, sehingga pembangunan gedung-gedung baru tersebut jangan sampai keluar dari rohnyanya cagar budaya. Untuk itulah, Pemkot Yogyakarta melaporkannya langsung kepada Gubernur DIY.

"Dua gedung yang akan dibangun di Kawasan Kotabaru ini akan menyesuaikan dengan bangunan cagar budaya yang sudah ada di masing-masing. Kita justru menyesuaikan dengan bangunan cagar budaya yang sudah ada," imbuhnya.

Sambungan hal 1

Kejagung

yang sedang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan. Pengambilalihan itu bisa dilakukan atas beberapa alasan.

Poin pertama, yakni adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Kedua, pengambilalihan dilakukan bila proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Poin ketiga, yakni bila penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Kemudian, keempat adalah bila penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi.

Untuk poin kelima, pengambilalihan dilakukan bila ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan

dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif atau legislatif. Poin keenam, yakni bila ada keadaan lain yang menurut pertimbangan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, berkas perkara kasus *red notice* Djoko Tjandra dengan tersangka Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo (PU) Tommy Sumardi (TS), Irfan Napoleon Bonaparte (NB) dan Djoko Tjandra (JT) sudah selesai dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Perkembangan penyidikan tindak pidana *red notice* tersangka PU, TS, JST dan NB telah melimpahkan atau melakukan tahap

satu penyerahan berkas perkara ke JPU," katanya di Mabes Polri, kemarin.

Berkas perkara tersebut sudah diterima Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung (Kejagung). "Untuk selanjutnya berkas perkara tersebut akan dipelajari," kata Kombes Ahmad Ramadhan.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, berkas perkara terkait kasus surat jalan palsu dan penghapusan *red notice* Djoko Tjandra akan selesai pekan ini. Nantinya, dia akan beri tahu lebih lanjut jika pemberkasan hal tersebut sudah selesai dan diberikan ke Jaksa Penuntut Umum. Pihaknya meminta masyarakat harus memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menyelesaikan hal tersebut.

Sambungan hal 1

Bea

dokumen yang nilainya di bawah atau sama dengan Rp 5 juta tidak perlu menggunakan meterai. "Ini adalah salah satu bentuk pemihakan. Ini kenaikan dari yang tadinya dokumen di atas Rp 1 juta harus berbiaya meterai," ujarnya.

Dikatakan, RUU Bea Meterai yang berisi 32 pasal tersebut juga mengatur mengenai penyederhanaan pengenaan pajak atas dokumen baik dalam bentuk kertas maupun digital. "Ini sesuai perubahan zaman sehingga kita berharap dengan adanya UU ini kita bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan nonkertas," katanya.

Kemudian, UU yang sudah 34 tahun belum

pemah direvisi ini turut memberikan kepastian hukum bagi dokumen elektronik untuk menggunakan meterai elektronik sesuai perkembangan teknologi. "Untuk saat terutang dan subjek bea meterai secara terperinci perjenis dokumen dan penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum," jelasnya.

Selanjutnya, RUU Bea Meterai mengatur mengenai pembebasan bea meterai terhadap penanganan bencana alam serta kegiatan bersifat keagamaan dan sosial dalam rangka mendorong program Pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional. Penyempurnaan sanksi administratif dan

ketidapatuhan pemenuhan pembayaran bea meterai juga diatur dalam RUU ini. Sanksi pidana pun tak luput disempurnakan dalam RUU Bea Meterai untuk meminimalkan sekaligus mencegah tindak pidana di bidang perpajakan. "Juga dilakukan penyempurnaan termasuk mengenai pendebaran, penjualan, pemakaian meterai palsu serta bekas pakai," katanya.

la mengatakan, berbagai kebijakan dalam RUU Bea Meterai yang sebentar lagi menjadi UU ini mulai diberlakukan pada awal Januari 2021 agar Pemerintah dapat menyiapkan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Sambungan hal 1

Oknum

Puspom TNI akan bekerja sama dengan Puspom TNI AL serta Puspom TNI AU untuk menyidik pelaku dari dua matra itu yang terlibat dalam penyerangan Polsek Ciracas dan sekitarnya. TNI memastikan akan menyelesaikan kasus ini secara transparan.

"Kita berharap terhadap rekan-rekan bila memiliki informasi tolong diberikan. Kita berharap kasus

ini dapat terbuka terang benderang dan dapat diikuti secara transparan," tegas Eddy.

Dikatakan, sesuai perintah pimpinan, diusut tuntas. Prajurit harus disiplin dan mempertanggungjawabkan yang dilakukan. Diingatkan pula kepada para prajurit TNI untuk berlaku sesuai tugas dan kewajibannya, serta tidak melupakan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Sambungan hal 1

BIKIN HIDUP MAKIN TERATUR

Samsung Galaxy Note20 Series Dilengkapi Bixby Routine

JAKARTA (KR) - Samsung Galaxy Note20 Series hadir dengan berbagai macam fitur yang dapat membuat bekerja dan bermain menjadi lebih powerful. Sebab Samsung Galaxy Note20 Series didesain para Life-Maximizers memahami sepenuhnya pengguna Note Series memerlukan perangkat yang dapat membantu mereka untuk melakukan multi-tasking dan memaksimalkan produktivitas dalam setiap aspek kehidupan. Untuk itu, Samsung memastikan perangkat Galaxy Note20 Series memiliki performa serta fitur-fitur yang mumpuni untuk mendukung gaya hidup, salah satunya fitur Bixby Routine yang membuat hidup makin teratur.



KR-Istimewa
Samsung Galaxy Note20 Series

"Bixby Routine merupakan sebuah fitur yang sudah ada sejak Galaxy S10 Series, namun ternyata masih belum banyak orang yang mengetahui penggunaannya. Padahal, Bixby Routine merupakan salah satu fitur yang dapat membantu penggunaannya untuk menjadi lebih produktif, melalui parameter-parameter yang dapat diatur melalui aplikasi Samsung Galaxy Note20 Series," tutur Head of Product, IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia Denny Galant di Jakarta, Kamis (3/9).

pengguna tidak dalam kondisi mengisi pada malam hari dan secara otomatis akan mengaktifkan mode Medium Power Saving, sehingga smartphone pengguna tetap menyala ketika bangun keesokan harinya.

"Tidak berhenti disana, pengguna dapat mengatur jam kerja pada Bixby Routine dan mengatur agar mengaktifkan mode diam agar lebih fokus pada waktu bekerja atau menyalakan playlist spesifik pada spotify yang membantu lebih semangat dalam bekerja," ujarnya.

Untuk melakukan pengaturan pada Bixby Routine, Denny menerangkan pengguna hanya perlu mengakses menu Bixby Routine pada menu settings atau swipe-down notification shade dan mengakses ikon Bixby. Setelah itu pilih menu Bixby Routine maka dapat mulai mengatur parameter-parameter mengatur rutinitas perangkat Galaxy Note20 Series. Kehabisan ide rutinitas apalagi yang dapat diperkaya oleh Bixby maka tidak perlu khawatir, karena dalam 14 hari Bixby akan secara otomatis merekam rutinitas dan akan memberikan rekomendasi, namun pastikan Bixby Routine dalam keadaan menyala.

Selain Galaxy Note20 Series, perangkat yang tergabung ke

dalam Galaxy Ecosystem lainnya seperti Galaxy Buds Live dan Galaxy Watch3 juga sudah mulai tersedia di Indonesia pada 21 Agustus 2020. Galaxy Watch3 hadir dalam dua varian ukuran yaitu 41mm seharga Rp5.999.000 dan 45mm senilai Rp 6.299.000, Galaxy Buds Live dibanderol seharga Rp 2.599.000 dengan dua varian warna black dan bronze. Konsumen dapat memilih varian warna black atau bronze pada bezel Galaxy Watch3. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk di situasi next normal ini Samsung menghadirkan pengalaman yang berbeda pada consumer launch kali ini. Konsumen dapat menikmati virtual exhibition untuk mendapatkan pengalaman Power To Work dan Power To Play dari Galaxy Note20 series serta perangkat Galaxy Ecosystem lainnya seperti Galaxy Watch3 dan Galaxy Buds Live dari manapun dan kapanpun layaknya mendatangi pameran secara langsung. "Konsumen bisa mengakses virtual exhibition di <https://note20launch.com/> yang akan berlangsung hingga September 2020. Untuk penjelasan lebih lanjut untuk Galaxy Note20 series dan Galaxy Ecosystem lainnya, silakan kunjungi www.samsung.com/id, pungkas Denny. (Ira)

DPRD JATENG LUNCURKAN BERLIAN TV



DITENGAH pandemi covid-19 yang banyak menyerap energi seluruh lapisan masyarakat, tidak menyurutkan langkah jajaran Sekretariat DPRD Jawa Tengah untuk berinovasi, sehingga tercipta produk jurnalistik penyiaran dalam wadah digital, yaitu dengan diresmikannya operasional Berlian TV.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto, saat meresmikan Berlian TV di gedung DPRD Jawa Tengah di Semarang Kamis (3/9). Operasional Berlian TV merupakan kado bagi DPRD Jawa Tengah yang pada tanggal 3 September 2020, tepat satu tahun DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

"Ini sangat membanggakan. Dewan harus mendukung upaya jajaran Setwan yang telah merealisasikan program digitalisasi parlemen, salah satunya dengan diluncurkannya Berlian TV. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah atas prestasi ini," tutur Bambang Kusriyanto.

Menurut Bambang, di era digital ini media sosial merupakan wahana informasi dan komunikasi paling populer. Lalu lintas komunikasi menjadi tidak terbatas secara ruang dan waktu. Ke depan, kekuatan media sosial berpo-tensi menjadi

kenyataan jika digarap secara serius. Kunciannya adalah bagaimana teknologi dan glo-balisasi yang mengarah ke virtualisasi ini dapat dimanfaatkan secara tepat.

Semua bentuk media virtual, seperti media sosial, media elektronik, penting dioptimalkan oleh semua pihak, khususnya di jajaran pemerintah. Semakin banyak media dimanfaatkan, akan semakin banyak informasi, saran, masukan, dan kritik dari publik yang diserap.

"Hal yang tidak kalah pentingnya adalah respon cepat. Komunikasi virtual mesti diluncurkan dua arah secara dinamis. Tindak lanjut atas saran dan kritik mesti cepat dipublikasikan demi kepuasan publik. Ini harapan masyarakat yang harus bisa segera direalisasikan," tegas Bambang Kusriyanto.

Di Sekretariat DPRD

Jawa Tengah, beberapa aplikasi berbasis teknologi digital telah dibangun. Mulai dari E Wadul Dewan, E Aspirasi dan yang terbaru E Legislasi, yaitu pembahasan Peraturan Daerah (Perda) secara Online. Ke depan DPRD Jawa Tengah juga akan membangun aplikasi E Pengawasan. Aplikasi ini merupakan jembatan antara konstituen dengan wakil rakyat. "Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini tidak ada sekat antara masyarakat dengan DPRD," ujar Bambang.

Bambang Kusriyanto mengatakan, Teve Digital yang diberi label Berlian TV ini diharapkan dapat membangun optimisme publik. Setiap informasi terkini harus disampaikan dengan cepat dan akurat. Berlian Teve diharapkan akan mampu meredam stigma-stigma negative dan harus menjadi sosok

yang dapat mempengaruhi publik, dengan tetap bersikap independen dan berimbang.

"Yang jelas, dewan akan mendukung upaya Setwan yang akan menjadikan parlemen di Jawa Tengah ini menjadi semakin modern, dengan menerapkan berbagai aplikasi berbasis teknologi digital. Parlemen harus mendukung karena terkait dengan anggaran untuk operasional semua program digitalisasi tersebut," ujar Bambang Kusriyanto.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Urip Sihabudin mengatakan, di usia DPRD Jawa Tengah yang memasuki tahun pertama ini, Setwan terus melambungkan berbagai pembenahan agar tercipta kinerja yang lebih baik.

Urip mengatakan memiliki gagasan untuk meng-create program digitalisasi di semua pro-

ses kegiatan kesekretariatian dan kedewan. "Selama ini semua proses kerja di lingkungan DPRD Jawa Tengah, baik di kesekretariatian maupun di kedewan masih dikerjakan secara manual. Sistem kerja tersebut kurang efisiensi diterapkan di era digital ini. Dari sisi keterbukaan terhadap publik juga sangat kurang, karena publik tidak bisa mengakses kinerja Dewan secara langsung.

Dengan sistem kerja yang masih manual, Masyarakat tidak bisa berpartisipasi aktif dalam proses legislasi, karena belum adanya kanal atau saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka. Untuk Sekwan mendorong dilakukan digitalisasi dalam setiap proses pelaksanaan fungsi DPRD Jawa Tengah, agar lebih transparan partisipatif, efisiensi dan akuntabel,"

tutur Urip.

Menurut Urip, hal ini sejalan dengan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendeklarasikan diri menjadi Provinsi Cerdas sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas. Untuk mengsinkronkan dengan program Pemrov Jawa Tengah yang telah mendeklarasikan menjadi Provinsi Cerdas, parlemennya juga harus maju. Untuk itu Setwan ingin membangun Parlemen Digital Jawa Tengah.

Menurut Urip, rancangan parlemen digital Jawa Tengah dilakukan dengan membuat sistem baru atau melakukan revisi terhadap sistem yang sudah ada, dan mengintegrasikannya dalam satu sistem, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Kedewan (Sipelwan).

Dengan sistem baru tersebut, Setwan akan mendorong untuk memperkuat edukasi budaya digital kepada pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah, dan stakeholder terkait khususnya masyarakat.

Peningkatan budaya masyarakat terutama konstituen anggota DPRD dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting. Tujuannya agar aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD tidak harus dengan cara demonstrasi atau unjuk rasa tetapi bisa dilakukan melalui digital sistem.

"Apabila parlemen digital Jawa Tengah berhasil, manfaat yang bisa dirasakan adalah pelayanan administrasi lebih cepat, pelaksanaan fungsi pengawasan lebih terstruktur sejalan dengan masukan dari masyarakat, serta efisien dalam menggunakan kertas.



KR-Budiono

Bambang Kusriyanto.

Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui kanal-kanal yang ada," ujar Urip Sihabudin.

Menurut Urip, parlemen digital mengadopsi teknologi digital dalam aktifitas kedewan. Aktivitas itu mencakup penyerapan aspirasi proses legislasi, serta aktivitas administrasi yang mendukung kegiatan tersebut. Dengan demikian, parlemen digital dijabarkan pelaksanaannya dalam empat konsep, yaitu penyiaran digital, pengembangan web, aplikasi terintegrasi, dan peningkatan literasi.

Namun untuk mendukung parlemen digital Jawa Tengah, Setwan akan mengkaji UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 dengan fokus utama pelaksanaan fungsi pengawasan.

Selain itu, juga akan disusun Sistem Informasi Pelayanan Kedewan yang meliputi e-pengawasan, revisi e-legislasi, dan e-aspirasi serta mengintegrasikan sistem informasi yang ada. Untuk itu Setwan mengusulkan kepada pimpinan DPRD agar dibuat payung hukum Parlemen Digital Jawa Tengah dan peningkatan kapasitas stakeholder. (Adv/Budiono)



KR-Budiono

Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto saat melakukan wawancara perdana di studio Berlian TV usai peresmian.